

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Bojongasih yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Bojongasih disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten

- Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Surat Edaran Bupati Nomor 002 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bojongasih Tahun 2024;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Bojongasih pada Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bojongasih Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Bojongasih dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Bojongasih Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023, Tahun Berjalan 2024 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BOJONGASIH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongasih Tahun 2023, Tahun Berjalan 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Bojongasih

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bojongasih Tahun

2021-2026, tujuan Kecamatan Bojongasih adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan

Bojongasih yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Bojongasih;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Bojongasih;
3. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Bojongasih.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Bojongasih pada tahun 2022 dan tahun 2023 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 19 bentuk sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongasih Tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel. 2.1.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN
BOJONGASIH S/D TAHUN 2022**

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) | SATUAN | KONDISI AWAL 2020 | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | | | | | |
|------|------------------------------------|---|--------|-------------------------|---|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN 2026 | | | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | TARGET | Rp. | | | |
| | | | | | | | 1.766.135.858 | | 1.890.745.336 | | | 2.153.235.180 | | 2.164.735.180 | | 2.176.235.180 | | 2.187.735.180 | | 2.197.735.180 | | |
| 7 | 1 | 1 | | | | | 1.592.485.858 | 100% | 1.717.095.336 | 100% | 1.957.585.180 | 100% | 1.965.085.180 | 100% | 1.972.585.180 | 100% | 1.980.085.180 | 100% | 1.986.585.180 | 100% | 1.986.585.180 | PD Kecamatan Bojongasih |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | | | | | | | | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | | | | | | | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.000.000 | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | | | | | | | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 007 | | | | | | | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | | | | 1.290.359.408 | 100 | 1.290.359.408 | 100 | 1.434.249.252 | 100 | 1.434.749.252 | 100 | 1.435.249.252 | 100 | 1.435.749.252 | 100 | 1.436.249.252 | 100 | 1.436.249.252 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | | | 1.290.359.408 | 12 | 1.290.359.408 | 12 | 1.434.249.252 | 12 | 1.434.749.252 | 12 | 1.435.249.252 | 12 | 1.435.749.252 | 12 | 1.436.249.252 | 12 | 1.436.249.252 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | | | | | | | | 100 | 12.000.000 | 100 | 13.000.000 | 100 | 14.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | | | | | | | 14 | 7.000.000 | 14 | 7.500.000 | 14 | 8.000.000 | 14 | 8.500.000 | 14 | 8.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------|-----|--|--|-------------|-----|-----|------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | - | - | - | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.500.000 | 7 | 6.000.000 | 7 | 6.500.000 | 7 | 6.500.000 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum | % | 100 | 100 | 67.361.550 | 100 | 120.014.950 | 100 | 123.014.950 | 100 | 126.014.950 | 100 | 129.014.950 | 100 | 132.014.950 | 100 | 135.014.950 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Paket Alat tulis Kantor | Paket | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | 26.911.300 | 5 | 47.331.750 | 5 | 47.831.750 | 5 | 48.331.750 | 5 | 48.831.750 | 5 | 49.331.750 | 5 | 49.831.750 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah persediaan peralatan rumah tangga | Paket | - | - | - | - | 30.592.950 | - | 31.092.950 | - | 31.592.950 | - | 32.092.950 | - | 32.592.950 | - | 33.092.950 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 4.100.250 | 2 | 4.100.250 | 2 | 4.600.250 | 2 | 5.100.250 | 2 | 5.600.250 | 2 | 6.100.250 | 2 | 6.600.250 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | - | - | 1.800.000 | - | 1.800.000 | - | 2.300.000 | - | 2.800.000 | - | 3.300.000 | - | 3.800.000 | - | 4.300.000 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 008 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 1.600.000 | 12 | 3.240.000 | 12 | 3.740.000 | 12 | 4.240.000 | 12 | 4.740.000 | 12 | 5.240.000 | 12 | 5.740.000 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 32.950.000 | 12 | 32.950.000 | 12 | 33.450.000 | 12 | 33.950.000 | 12 | 34.450.000 | 12 | 34.950.000 | 12 | 35.450.000 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor | % | 100 | - | - | 100 | 147.216.900 | 100 | 148.716.900 | 100 | 150.216.900 | 100 | 151.716.900 | 100 | 153.216.900 | 100 | 154.716.900 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | - | - | - | 7 | 17.108.000 | 7 | 17.608.000 | 7 | 18.108.000 | 7 | 18.608.000 | 7 | 19.108.000 | 7 | 19.608.000 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan | unit | - | - | - | 1 | 35.680.000 | 1 | 36.180.000 | 1 | 36.680.000 | 1 | 37.180.000 | 1 | 37.680.000 | 1 | 38.180.000 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 007 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | - | 18 | 94.428.900 | 18 | 94.928.900 | 18 | 95.428.900 | 18 | 95.928.900 | 18 | 96.428.900 | 18 | 96.928.900 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 22.800.000 | 100 | 58.600.000 | 100 | 122.700.000 | 100 | 123.200.000 | 100 | 123.700.000 | 100 | 124.200.000 | 100 | 124.700.000 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 8.400.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.500.000 | 12 | 13.000.000 | 12 | 13.500.000 | 12 | 14.000.000 | 12 | 14.500.000 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Administrasi | Orang/Bulan | - | - | - | - | - | 2 | 28.800.000 | 2 | 28.800.000 | 2 | 28.800.000 | 2 | 28.800.000 | 2 | 28.800.000 | |
| | | | | | | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Operator Komputer | Orang/Bulan | - | - | - | - | 1 | 20.400.000 | 1 | 20.400.000 | 1 | 20.400.000 | 1 | 20.400.000 | 1 | 20.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Operator Komputer Keuangan | Orang/Bulan | - | - | - | 1 | 32.200.000 | 1 | 32.200.000 | 1 | 32.200.000 | 1 | 32.200.000 | 1 | 32.200.000 | 1 | 32.200.000 | |
| | | | | | | Jumlah Petugas Pemasang Spaduk dan Baligho | Orang/Bulan | - | - | - | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.200.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------|-----|--|---|-------------|------|------|-------------|------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Kebersihan | Orang/Bulan | - | - | - | - | 1 | 14.400.000 | 1 | 14.400.000 | 1 | 14.400.000 | 1 | 14.400.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Keamanan | Orang/Bulan | 4 | 4 | 14.400.000 | 4 | 13.200.000 | 1 | 13.200.000 | 1 | 13.200.000 | 1 | 13.200.000 | 1 | 13.200.000 | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | | Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 105.982.450 | 100 | 100.904.078 | 100 | 101.904.078 | 100 | 102.904.078 | 100 | 103.904.078 | 100 | 104.904.078 | 100 | 105.904.078 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 7 | 7 | 91.947.675 | 7 | 86.869.303 | 7 | 87.369.303 | 7 | 87.869.303 | 7 | 88.369.303 | 7 | 88.869.303 | 7 | 89.369.303 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 1 | 14.034.775 | 1 | 14.034.775 | 1 | 14.534.775 | 1 | 15.034.775 | 1 | 15.534.775 | 1 | 16.034.775 | 1 | 16.534.775 | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan Bojongasih | 100% | 100% | 100% | 60.650.000 | 100% | 60.650.000 | 100% | 62.650.000 | 100% | 64.650.000 | 100% | 66.650.000 | 100% | 68.650.000 | 100% | 70.650.000 | PD Kecamatan Bojongasih |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 5 | 35.000.000 | 5 | 35.000.000 | 5 | 36.000.000 | 5 | 37.000.000 | 5 | 38.000.000 | 5 | 39.000.000 | 5 | 40.000.000 | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 4 | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.500.000 | 4 | 26.000.000 | 4 | 26.500.000 | 4 | 27.000.000 | 4 | 27.500.000 | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 11.500.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.500.000 | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Dokumen | 6 | 6 | 15.000.000 | 6 | 15.000.000 | 6 | 15.500.000 | 6 | 16.000.000 | 6 | 16.500.000 | 6 | 17.000.000 | 6 | 17.500.000 | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 6 | 15.000.000 | 6 | 15.000.000 | 6 | 15.500.000 | 6 | 16.000.000 | 6 | 16.500.000 | 6 | 17.000.000 | 6 | 17.500.000 | |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Capaian Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Urusan | 1 | 1 | 10.650.000 | 1 | 10.650.000 | 1 | 11.150.000 | 1 | 11.650.000 | 1 | 12.150.000 | 1 | 12.650.000 | 1 | 13.150.000 | |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | 001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 1 | 1 | 10.650.000 | 1 | 10.650.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------|-----|--|---|---------|-----|--------|------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------------------------|
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | 003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | | | | | | 1 | 11.150.000 | 1 | 11.650.000 | 1 | 12.150.000 | 1 | 12.650.000 | 1 | 13.150.000 | |
| 7 | 01 | 003 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Peningkatan Status Desa | % | n/a | n/a | - | - | - | 16,67 | 10.000.000 | 16,67 | 10.000.000 | 16,67 | 10.000.000 | 16,67 | 10.000.000 | 16,67 | 10.000.000 | PD Kecamatan Bojongasih |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Dokumen | | | | | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | | - | - | - | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | |
| 7 | 01 | 004 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 76.000.000 | 100% | 76.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | PD Kecamatan Bojongasih |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 5 | 5 | 76.000.000 | 5 | 76.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | | - | - | - | - | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 5 | 5 | 76.000.000 | 5 | 76.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 005 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.500.000 | 100 | 76.000.000 | 100 | 76.500.000 | 100 | 77.000.000 | PD Kecamatan Bojongasih |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | | 100,00 | 25.000.000 | 100,00 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.500.000 | 100 | 76.000.000 | 100 | 76.500.000 | 100 | 77.000.000 | |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | | 150 | 25.000.000 | 150 | 25.000.000 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------|-----|---|---|---------|-----|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-------------------------|
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 004 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | | | | | | 400 | 75.000.000 | 400 | 75.500.000 | 400 | 76.000.000 | 400 | 76.500.000 | 400 | 77.000.000 | |
| 7 | 01 | 006 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangann | % | 100 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.000.000 | 100 | 23.000.000 | 100 | 24.500.000 | 100 | 26.000.000 | 100 | 27.500.000 | 100 | 28.500.000 | PD Kecamatan Bojongasih |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Yang Telah Memperoleh Pembinaan dan Pengawasan | Dokumen | 12 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 18 | 23.000.000 | 18 | 24.500.000 | 18 | 26.000.000 | 18 | 27.500.000 | 18 | 28.500.000 | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | | | | | | 6 | 10.000.000 | 6 | 10.500.000 | 6 | 11.000.000 | 6 | 11.500.000 | 6 | 11.500.000 | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 6 | 6 | 6.000.000 | 6 | 6.000.000 | 6 | 6.500.000 | 6 | 7.000.000 | 6 | 7.500.000 | 6 | 8.000.000 | 6 | 8.500.000 | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 6 | 6 | 6.000.000 | 6 | 6.000.000 | 6 | 6.500.000 | 6 | 7.000.000 | 6 | 7.500.000 | 6 | 8.000.000 | 6 | 8.500.000 | |

Berdasarkan tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bojongasih s/d Tahun 2022 adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut pada tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1

Realisasi program / kegiatan / Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

| PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) |
|---|--|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojongasihh. |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Sesuai Aturan |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN di Kecamatan |

| | |
|---|--|
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Paket Alat tulis Kantor |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah persediaan penyediaan peralatan rumah tangga |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Administrasi |

| | |
|---|--|
| | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Operator Komputer |
| | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Operator Komputer Keuangan |
| | Jumlah Petugas Pemasang Spaduk dan Baligho |
| | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Kebersihan |
| | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Keamanan |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongasih |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentasi Peningkatan Status Desaa |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah |

| | |
|---|--|
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangann |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Yang Telah Memperoleh Pembinaan dan Pengawasan |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa |

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana pada tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2

Realisasi program / kegiatan / Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

| PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) |
|--|--|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojongasihh. |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah persediaan penyediaan peralatan rumah tangga |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |

| | |
|--|--|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Tenaga Operator Komputer Keuangan |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongasih |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Capaian Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentasi Peningkatan Status Desaa |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |

| | |
|--|---|
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangann |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Yang Telah Memperoleh Pembinaan dan Pengawasan |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif |

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongasih, yaitu Tahun 2022 sebesar 84,46 poin dari target 84,51 poin dan Tahun 2024 sebesar 00,00 poin dari target 84,77 poin, bila dibandingkan akhir tahun Renstra sebesar 98,85 %.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
 - a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah

- Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Bojongasih;
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
- b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :
- Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bojongasih sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak dianggarkan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;
 - Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator nilai IKM adalah karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
 - b) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongasih Capaian target kinerja keuangan Tahun 2022 mencapai **92,26 %** sebagaimana pada tabel 2.2. Sedangkan realisasi target kinerja keuangan Tahun berjalan 2023 sebagaimana tabel 2.3.

Tabel. 2.2
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2022

| PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.455.028.149 | 1.310.881.234 | 144.146.915 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.931.750 | 25.931.750 | - |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4.100.250 | 4.100.000 | 250 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.240.000 | 3.240.000 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 9.995.000 | 9.995.000 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7.100.000 | 6.934.558 | 165.442 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40.000.000 | 40.000.000 | - |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 73.898.653 | 73.848.550 | 50.103 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | - |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 25.000.000 | 25.000.000 | - |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | - |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 15.000.000 | 14.999.450 | 550 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 10.650.000 | 10.650.000 | - |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | - |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | - |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 75.000.000 | 75.000.000 | - |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | - |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | - |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 25.000.000 | 25.000.000 | - |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | - |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | - |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | - |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 6.000.000 | 6.000.000 | - |
| | 1.803.743.802 | 1.659.380.542 | 144.363.260 |

Tabel. 2.3
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Berjalan s/d Bulan APRIL 2023

| PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|--|---------------|-------------|---------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.529.125.794 | 378.374.081 | 1.150.751.713 | 4,04 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.591.000 | 13.304.500 | 26.286.500 | 2,98 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.908.700 | 6.908.700 | - | 1,00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4.059.000 | 1.200.000 | 2.859.000 | 3,38 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.000.000 | 750.000 | 1.250.000 | 2,67 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.600.000 | 525.000 | 3.075.000 | 6,86 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 21.977.000 | 2.200.000 | 19.777.000 | 9,99 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8.500.000 | 2.273.651 | 6.226.349 | 3,74 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 34.400.000 | 12.800.000 | 21.600.000 | 2,69 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | - | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 85.174.300 | 23.980.500 | 61.193.800 | 3,55 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.050.000 | 5.050.000 | - | 1,00 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | - | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 14.090.000 | 2.590.000 | 11.500.000 | 5,44 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | - | |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 1,00 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 18.730.000 | 2.207.000 | 16.523.000 | 8,49 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | - | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | - | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 60.600.000 | 42.415.400 | 18.184.600 | 1,43 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | - | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | - | |

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 25.000.000 | 1.102.500 | 23.897.500 | 22,68 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | - | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | - | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 11.510.000 | 6.245.000 | 5.265.000 | 1,84 |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 14.255.000 | 14.130.000 | 125.000 | 1,01 |
| | 1.899.570.794 | 531.056.332 | 1.368.514.462 | 3,58 |

Berdasarkan tabel 2.3. capaian target kinerja keuangan Kecamatan Bojongasih Tahun berjalan sampai dengan Bulan April 2023 mencapai 3.58 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongasih

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongasih dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya

| No. | Indikator Kinerja | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|-------|----------|--------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik | | | N/A | 59 (CC) | 60 (CC) | 61 (B) | N/A | N/A | 60 (CC) | 61 (B) | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik | | | 84,46 | 84,71 | 84,97 | 85,22 | 84,77 | 84,81 | 85,06 | 85,32 | |
| 3 | Persentase peningkatan Status Desa | | | N/A | N/A | 25% | 25% | N/A | N/A | 25% | 25% | |
| 4 | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongasih;

➤ Faktor pendorong:

meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

SDM yang tidak professional dan sarana dan prasarana pelayanan.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Faktor penghambat:

SDM aparatur dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.

c) Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.

➤ Faktor penghambat:

Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

➤ Faktor pendorong:

Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.

➤ Faktor penghambat:

Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyusunan pelaporan

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.

2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu :

a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojongasih, hal ini disebabkan karena

belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.

- b) Persentase peningkatan Status Desa belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bojongasih

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan

Bojongasih dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target

serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongasih sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Bojongasih dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojongasih tidak tercapai karena disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongasih, antara lain :

Sekretariat

- a. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Bojongasih, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Bojongasih

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Bojongasih, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika

harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum

- d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi

perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Bojongasih terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program, per kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Berdasarkan pada tabel 2.3 rancangan awal RKPD dan hasil review todak ada penambahan anggaran.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Bojongasih. Namun dalam proses ini Kecamatan Bojongasih mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bojongasih terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOJONGASIH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Bojongasih merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Bojongasih melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bojongasih tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan-Sasaran Renja Kecamatan Bojongasih Kabupaten
Tasikmalaya

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Indikator Sasaran Pada Tahun | | |
|-----|---|--|---|------------------------------|---------|---------|
| | | | | 2022 | 2024 | 2024 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kec. Bojongasih | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Bojongasih | N/A | 59 (CC) | 60 (CC) |
| | | 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kec. Bojongasih | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongasih | 84,46 | 84,71 | 84,97 |
| | | 3 Meningkatkan kemandirian desa di | Persentase peningkatan Status Desa | N/A | N/A | 25% |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|------|----------|----------|
| | | wilayah Kecamatan Bojongasih | | | | |
| | 4 | Meningkatnya a kondusifitas di wilayah Kecamatan Bojongasih | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% | 100 % | 100 % |
| | | | Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani | 100% | 100 % | 100 % |
| | | | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan | 100% | 100 % | 100 % |

Dari tujuan dan sasaran tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Bojongasih di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya akan terwujud.

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bojongasih Tahun Anggaran 2024

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bojongasih tahun anggaran 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran

(*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Bojongasih. Secara lebih lengkap rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 diinput dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp.2.077.678.182,- dengan rincian uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel 3.2.

Tabel. 3.2.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------------|---|---|-----------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | KECAMATAN BOJONGASIH | | | | | | 2.077.768.182,00 | | | | | | 2.104.725.794,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 2.077.768.182,00 | | | | | | | 2.104.725.794,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 2.077.768.182,00 | | | | | | | 2.104.725.794,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojongasih</i> | 65 (B) Poin 65 (B) Poin 65 (B) Poin 65 (B) Point | | | 61 (B) Point 61 (B) Poin | 1.868.233.182,00 | | | | | | 63 (B) Poin 63 (B) Poin 63 (B) Poin 63 (B) Point | 1.906.725.794,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | - | | | 100 % | 0,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 7 Dokumen | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|---|--|--|-------|------------------|--|--|---|---|---|---|------------------|----------------------|
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Sesuai Aturan</i> | - | | | 100 % | 1.529.125.794,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 1.540.125.794,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
|--|--------------|--|--|---|--|--|-------|------------------|--|--|---|---|---|---|------------------|----------------------|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 12 Orang/bulan | 1.529.125.794,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 1.540.125.794,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 14 Paket | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | | | | 7 Orang | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</i> | - | | | 100 % | 92.760.000,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 96.100.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 5 Paket | 45.004.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik | - | | 46.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 31 Paket | 7.001.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |

| | | |
|--|-------------------|---|
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
|--|-------------------|---|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 4.100.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 4.100.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | | | 250 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 2.500.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i> | | | | 20 Laporan | 3.600.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 100 Laporan | 31.055.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 32.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor</i> | - | | | 100 % | 73.990.000,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 86.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 6.000.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 16.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 5 Unit | 67.990.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 70.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | - | | | 100 % | 67.150.000,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 77.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 4 Laporan | 11.000.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 56.150.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik | - | | 65.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | - | | | 100 % | 105.207.388,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 107.500.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 7 Unit | 90.337.388,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 92.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--------|------|---|---|---|--|---|--|------|----------------------|
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
|--|--|--|---|--|--|--|--------|------|---|---|---|--|---|--|------|----------------------|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 3 Unit | 14.870.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 15.500.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongasih</i> | 100 % 100 % | | | 100 % | 47.820.000,00 | | | | | | 100 % 100 % | 50.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | - | | | 5 dokumen | 14.090.000,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 15.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> | | | | 4 Laporan | 14.090.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i> | - | | | 6 dokumen | 15.000.000,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 16.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|-----------|---------------|---|---|---|--|---|--|---------------|----------------------|
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 6 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 16.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
|--|--|--|---|--|--|--|-----------|---------------|---|---|---|--|---|--|---------------|----------------------|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | <i>Capaian Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</i> | - | | | 1 Urusan | 18.730.000,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 19.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i> | | | | 1 Laporan | 18.730.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 19.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | <i>Persentasi Peningkatan Status Desaa</i> | 16.67 % | | | 16.67 % | 0,00 | | | | | | 16.67 % | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | - | | | 1 dokumen | 0,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | <i>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti</i> | 100 % | | | 100 % | 110.050.000,00 | | | | | | 100 % | 95.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | <i>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> | - | | | 12 dokumen | 110.050.000,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 95.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i> | | | | 5 Laporan | 110.050.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 95.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | | | 100 % | 25.000.000,00 | | | | | | 100 % | 26.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | <i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | - | | | 100 % | 25.000.000,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 26.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | | | | 300 Orang | 25.000.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 26.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i> | | | | 0 Orang | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangann | 100 % | | | 100 % | 26.665.000,00 | | | | | | 100 % | 27.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|--|--|------------|---------------|--|--|---|---|---|---|---------------|----------------------|
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <i>Persentase Desa Yang Telah Memperoleh Pembinaan dan Pengawasan</i> | - | | | 18 dokumen | 26.665.000,00 | | | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | - | 27.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
|--|--------------|---|---|---|--|--|------------|---------------|--|--|---|---|---|---|---------------|----------------------|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i> | | | | 6 Dokumen | 0,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 0,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i> | | | | 18 Dokumen | 11.510.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i> | | | | 1 Dokumen | 15.155.000,00 | Kab. Tasikmalaya, Bojongasih, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BOJONGASIH |
| J U M L A H | | | | | | | | 2.077.768.182,00 | | | | | | | 2.104.725.794,00 | |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojongasih tahun Anggaran 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Bojongasih Tahun 2024. Kecamatan Bojongasih sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojongasih Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bojongasih dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bojongasih yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Bojongasih. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Bojongasih.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian

terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Bojongasih, Desember 2023

Camat Bojongasih



YAN SUPRIADI, S.Pd

NIP. 19661019 198603 1 004